UNIVERSITAS GADJAH MADA
Hubungan KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi kasus Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak 2017)
KHOERUL ANAM, R. B. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
Daftar Tabel vii
ABSTRAKSI viii
ABSTRAK ix
BAB 1 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Kerangka Teori 7
1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. 8
2. Pola Hubungan Pusat dan Daerah Komisi Pemilihan Umum 13
E. Metodologi Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian. 14
F. Sistematika Penulisan. 17
BAB II 19
Pola Hubungan Pusat dan Daerah KOMISI PEMILIHAN UMUM Dalam Struktur Hierarki 19
A. Pengantar 19
B. Penyelenggaraan Pemilihan dalam Kasus Integritas. 20
C. Pola Hubungan KPU sebagai sebuah Organisasi Hierarki. 24
1. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Struktur Organisasi KPU 24
2. Teknologi dalam Pemilu Kepala Dearah 30
D. Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh Barat daya 32
1. Profil Kabupaten Aceh Barat Daya 32
2. Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat daya 32
3. KIP Aceh Barat Daya 33

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Hubungan KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi kasus Penetapan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak 2017)**
KHOERUL ANAM, R. B. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III 35

Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati 35

A. Pengantar 35

B. Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 35

1. Pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati 37

2. Proses Penetapan Bakal Pasangan Calon 46

3. Perubahan Keputusan Penetapan Pasangan Calon 52

C. Relasi dengan Penyelenggara Pemilu. 58

1. KIP dan Panwaslih Aceh Barat Daya 60

2. Berkonflik dengan Panwaslih 61

BAB IV 64

Faktor Penghambat Hubungan KPU Pusat dan KIP Aceh Barat Daya dan Konsekuensi Dalam Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2017 64

A. Pengantar 64

B. Faktor Penghambat Hubungan KPU Pusat dan KIP Aceh Barat Daya 64

1. Terputusnya Komunikasi yang Berjenjang 64

2. Regulasi yang Berubah-ubah. 69

3. Kendali dari Lembaga Lain 71

4. Pemahaman Tata Kelola Kepemiluan yang Kurang 74

C. Konsekuensi Hubungan KPU dengan KIP Aceh Barat Daya terhadap Penyelenggaraan Pilkada 2017 76

1. Integritas Penyelenggara Pemilu 77

2. Terhambatnya Pelaksanaan Tahapan 79

BAB V 81

PENUTUP 81

A. Kesimpulan. 81

B. Rekomendasi 84

1. Aspek Regulasi Tata Kerja Penyenggara. 84

2. Aspek Pola Hubungan Organisasi KPU 86

Daftar Pustaka 88